

LULUSAN SEKOLAH DASAR (SD) MENJADI PEMBANTU RUMAH TANGGA DAN DAGANG KOPI CANTIK (DAKOCAN) : PERSPEKTIF DUALISME KULTURAL

Nengah Bawa Atmadja dan Anantawikrama Tungga Atmadja

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak: Ratusan anak wanita lulusan SD di berbagai kecamatan di Kabupaten Buleleng tidak melanjutkan ke SMP. Padahal pemerintah telah menetapkan SMP sebagai sekolah gratis. Mereka lebih suka merantau ke kota menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau tetap tinggal di desanya sambil membuka warung. Penyebabnya kemiskinan orang tua sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anak wanitanya. Walaupun gagasan ini ada benarnya, namun peran ideologi dominan pada masyarakat Bali, yakni berbagai bentuk dualisme kultural tidak bisa diabaikan. Dualisme kultural memunculkan tindakan orang tua memarginalkan anak wanita dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan pendidikan formal.

Abstract: Hundreds of elementary school graduate female students at any district in Buleleng regency weren't continue to Junior High School. Even the government has decided Junior High School to be free. They prefer go to the city and work as a house servant or stay at home and open the coffee shop. Because of parents' poverty, they are not able to send their female children to school. Even this idea is quite correct, but ideology role is dominant on Balinese community such any kind of dualism culture cannot be ignored. Dualism culture shows the parents action in marginalising their female children in fulfillment of basic need toward formal education.

Kata kunci: Pendidikan, dualisme kultural, peminggiran wanita

Data pada Dinas Pendidikan Buleleng menunjukkan, bahwa tahun 2009/2010, lulusan Sekolah Dasar (SD) di Buleleng ada sebanyak 11.312 orang. Ketika memasuki tahun ajaran 2010/2011, sebanyak 408 orang anak lulusan SD melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng. Dari jumlah 408 orang ini, sebanyak 50 orang melanjutkan ke SMP di luar Buleleng. Jadi, jumlah anak yang tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 358 orang. Gejala ini merupakan masalah, mengingat sekolah merupakan lembaga amat penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Begitu pula keengganan anak-anak lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP merupakan kendala serius bagi penyelenggaraan program pendidikan dasar sembilan tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

(*Harian Bali Post*, Selasa, 13-7-2010: 4).

Ketidakmauan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP, dilihat dari segi teks ideal, semestinya tidak terjadi, sebab: *pertama*, pemerintah telah memprogramkan sekolah gratis bagi warganya. *Kedua*, SMP memelosok sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak di desa. *Ketiga*, prasarana dan sarana transportasi sangat memadai Buleleng terkenal sebagai kabupaten yang memiliki jalan sangat bagus sampai ke pelosok desa sehingga SMP mudah dijangkau, baik melalui jalan kaki maupun naik sepeda. Pendek kata, dilihat dari segi teks ideal, yakni tata aturan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan hal-hal lain yang mendukungnya tidak ada halangan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pen-

didikan SMP. Orang tua semestinya bergairah menyekolahkan anaknya, tidak hanya karena azas keterjangkauan dan ketersediaan, tetapi juga karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Anak-anak yang tidak melanjutkan ke SMP, selain anak laki-laki, banyak pula anak wanita. Keengganan orang tua menyekolahkan anak wanitanya, menarik dicermati, tidak semata-mata karena menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau teks ideal dan teks sosial tidak berkesesuaian, tetapi juga karena alasan yang menyertainya. Alasan orang tua tidak menyekolahkan anak wanitanya karena masalah kesulitan ekonomi. Akibatnya, orang tua lebih suka jika anak wanitanya berkerja di kota sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau membuka warung di desanya, baik secara mandiri maupun membantu kakak atau keluarganya yang sudah mendahului mewarung (*Harian Bali Post*, Selasa, 13 Juli 2010: 4). Warung seperti ini di Buleleng lazim disebut dagang kopi cantik atau diakronimkan menjadi *dakocan*.

Alasan ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anak wanitanya ke SMP merupakan alasan klasik yang memang ada benarnya. Namun, seperti dikemukakan Sanderson (1998) faktor ekonomi atau aspek infrastruktur material bukan satu-satunya penyebab bagi tindakan manusia, melainkan ada faktor lainnya yang bersumberkan pada aspek struktur sosial dan superstruktur ideologi. Struktur sosial terkait dengan sistem kepolitikan atau kekuasaan pada lingkungan keluarga. Superstruktur ideologi berkaitan dengan ide atau ideologi yang ada di balik struktur sosial dan infrastruktur material. "Ideologi adalah proses merepresentasikan relasi sosial material, dan proses upaya mendamaikan relasi tersebut dalam diskursus.... ideologi bekerja dengan cara mengorientasikan natural, nyata, jelas tanpa perlu dibuktikan, atau tak terelakan" (Thwaites, Davis dan Mules, 2009: 231-261). Berkenaan dengan itu maka muncul pertanyaan, "Ideologi apakah yang ada di balik keengganan orang tua menyekolahkan anak wanitanya ke SMP?" Secara teoretik ide sebagai jawaban atas pertanyaan ini tersimpan

dalam pikiran orang tua murid sehingga bersifat nirnyata. Walaupun nirnyata, namun teramati pada representasinya berbentuk ucapan dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia acap kali tidak menyadarinya, sebab suatu ide (ideologi) tersembunyi di alam bawah sadar (Althusser, 2004).

Dalam kondisi seperti ini maka dekonstruksi sangat penting agar ideologi yang ada dalam pikiran dan atau berada pada alam bawah sadar yang terepresentasi dalam ucapan dan tindakan terpahami secara jelas (Arivia, 2003; Barker, 2004; Asyhaddie, 2004). Pembongkaran tidak saja menyangkut pencarian makna denotatif dari ucapan dan tindakan, tetapi meminjam gagasan Barthers (2007) ditelusuri pula makna konotatifnya, termasuk di dalamnya muatan ideologi (mitos) yang berlanjut pada peminggiran anak wanita dalam menikmati pendidikan formal.

PEMBAHASAN

Walaupun pemerintah telah menerapkan pendidikan gratis, yakni tidak membayar uang pembangunan – lazim disebut uang pangkal, namun tetap ada pungutan lain bersifat terselebung. Misalnya, SPP tetap ada walaupun jumlahnya kecil. Begitu pula orang tua murid harus menyediakan dana pembelian alat-alat pelajaran, pakaian seragam, uang saku, dll. Belum terhitung lagi pengeluaran untuk berbagai barang aksesoris, misalnya HP, arloji, perhiasan, dll. Biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh orang tua jumlahnya bisa jadi cukup besar. Pelacakan yang dilakukan oleh beberapa orang guru SD terhadap anak wanita yang tidak melanjutkan ke SMP, memperkuat alasan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke SMP.

Sebaliknya, orang tua menyuruh anaknya berkerja. Misalnya ada orang tua yang menyatakan, "Biarkan anak saya tak bersekolah. Saya suruh berkerja jadi pembantu di Denpasar" (*Harian Bali Post*, Selasa, 13-7-2010: 4). Ada pula orang tua yang senang jika anak wanitanya membuka warung di pinggir jalan. Atau mereka membantu kakaknya

yang sudah membuka warung terlebih dahulu. Dalam konteks ini seorang guru SD menyatakan, bahwa “Banyak orang tua yang membiarkan anaknya membuka warung daripada harus masuk sekolah” (*Harian Bali Post*, Selasa, 13-7-2010: 4).

Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak semata-mata sebagai penanda adanya kesulitan ekonomi, melainkan merepresentasikan pula suatu ideologi. Adapun ideologi yang ada di baliknya adalah dualisme kultural, oposisi biner sebagaimana dikemukakan Levi-Strauss mempunyai strukturalisme (Kurzweil, 2004) atau masyarakat Bali menyebutnya dengan istilah *rwa bhineda* (Atmadja, 2010). Dualisme kultural berintikan pada ide yang memilahkan sesuatu menjadi dua hal yang berlawanan. Pemilahan ini bisa berujung pada pengutamaan atau penempatan yang satu pada posisi pusat, sebaliknya memorduakan atau bahkan meminggirkan yang lainnya. Gagasan yang terkait dengan dualisme kultural sangat beragam sebagaimana terlihat pada paparan sebagai berikut.

Dualisme kultural: laki-laki dan wanita

Masyarakat Bali mengenal dualisme kultural laki-laki dan wanita atau *purusa* dan *pradana*. Pemilahan ini terkait dengan ideologi patriarki, yakni gagasan yang tidak saja memilahkan antara laki-laki dan wanita, tetapi berlanjut pula pada pengutamaan atau pemusatan yang satu dan penomorduaan atau peminggiran yang lainnya, yakni laki-laki terhadap wanita (Atmadja, 2010a; Megawangi, 1999; Tong, 2004; Jackson dan Jones *ed*, 2009; Mufidah, 2003). Gagasan ini berlanjut dengan pemberlakuan hukum kekeluargaan pada masyarakat Bali, yakni berdasarkan *patriarchaat*, yakni hubungan seorang anak dengan keluarga (klen) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya (Panetja, 1986). Adat menetap anak laki-laki setelah menikah adalah patrilokal, yakni pada *karang pauhman* milik ayahnya. Anak laki-laki adalah ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh ayah dan atau leluhurnya, baik dalam bentuk harta *sekala* - tanah, rumah, dan benda-benda lainnya yang bergerak dan atau tidak bergerak maupun harta

niskala - *sanggah kemulan* dan *sanggah dadia* tempat memuja rokh leluhur dan dewa-dewa Hindu.

Anak laki-laki juga bertanggung jawab untuk memberikan asuransi sosial dan agama pada orang tuanya. Asuransi sosial berwujud kegiatan merawat orang tua pada saat masih hidup. Asuransi agama berwujud kewajiban melakukan ritual *ngaben* pada saat orang tua meninggal dunia. *Ngaben* dengan segala rangkaianannya sangat penting, karena bisa mengantarkan rokh orang tua dan leluhurnya menjadi *dewa pitara* untuk dipuja di *sanggah kemulan* (Diatmika, 2006; Wiana, 1992; Surayin, 2002). Dengan demikian, anak laki-laki merupakan modal sosial, budaya, agama, dan finansial bagi keluarga. Anak wanita memiliki posisi yang sebaliknya, sebab, setelah menikah dia ikut suaminya. Anak wanita tidak berstatus sebagai ahli waris sehingga dia tidak berkewajiban memberikan asuransi sosial dan agama pada orang tuanya. Anak wanita yang telah menikah secara otomatis menjadi milik suaminya, sebab dia menetap di lingkungan keluarga suaminya. Akibatnya, anak wanita lazim diberikan label yang becورak stereotip gender, yakni wanita adalah *pianak pisaga*. Patriarki amat kuat pada masyarakat Bali, bahkan meminjam gagasan Thwaites, Davis dan Mules (2009: 239) “... Patriarki berfungsi secara ideologis melalui dan sebagai mitis”.

Gagasan di atas memberikan petunjuk, bahwa secara ideologis laki-laki berada pada titik pusat atau sebagai *pancer* (tiang) keluarga, sebaliknya wanita berada pada titik pinggiran atau *nonpancer*. Penempatan wanita pada titik pinggiran atau *nonpancer* keluarga berlanjut pada marginalisasi anak wanita dalam berbagai bidang kehidupan. Berkenaan dengan itu maka keengganan orang tua menyekolahkan anak wanitanya ke SMP, bisa jadi tidak hanya karena pertimbangan ekonomi, melainkan terkait pula dengan masalah budaya, yakni dualisme kultural dan ideologi patriarki yang dimitiskan pada masyarakat Bali. Pengalaman menunjukkan, jika orang tua beranak banyak dengan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan, di sisi lain modal finansial sangat terbatas, maka anutan dualisme kultural dan ideologi patriarki acap kali berujung pada pemarginalan terhadap anak wanita. Anak wanita yang dikorbankan, yakni diputuskan sekolahnya, sebaliknya anak laki-laki diberikan prioritas utama dalam mengenyam pendidikan formal. Bahkan, tidak menutup kemungkinan anak wanita tidak saja dikorbankan lewat pembatasan menikmati pendidikan formal, melainkan bisa pula dikenai wajib kerja guna membiayai saudara laki-lakinya yang sedang bersekolah.

Dualisme kultural: sektor domestik dan publik

Ucapan orang tua lebih suka mem-PRT-kan anak wanitanya daripada melanjutkan ke SMP terkait pula dengan dualisme kultural, yakni pemilahan sektor domestik dan publik. Pemilahan ini bertumpu pula pada ideologi gender. Ideologi ini tidak semata-mata memisahkan laki-laki dan wanita dilihat dari segi peran gender yang dibentuk secara kultural, melainkan berlanjut pula pada pengutamaan yang satu daripada yang lainnya. Peran gender laki-laki diidentikkan dengan sektor publik dan dinilai berkedudukan lebih tinggi daripada peran gender wanita yang diidentikkan dengan sektor domestik (Megawati, 1999; Mufidah, 2003; Nugroho, 2008; Brooks, 2005). Kegiatan yang tercakup pada sektor domestik adalah aneka pekerjaan di sekitar rumah tangga, misalnya mencuci dan menyetrika pakaian, memasak dan mencuci alat-alat dapur, mengasuh anak, menyapu dan mengepel lantai, dll. Bertolak dari kenyataan ini maka gagasan orang tua mem-PRT-kan anak wanitanya, secara disadari maupun tidak bermuatan ideologis. Dalam artian, apa yang dilakukan pada dasarnya mendorong anak wanitanya agar menepi pekerjaan yang sesuai dengan dunia kulturalnya, yakni sektor domestik. Penanganan sektor domestik pada lingkungan keluarga tidak dibayar sehingga bersifat nonekonomis. Namun jika sang anak menjadi PRT, maka dia dibayar, sehingga terjadi komodifikasi peran gender demi

keuntungan orang tuanya.

Pekerjaan wanita sebagai *dakocan* sangat kental dengan muatan melayani pembeli yang kebanyakan kaum laki-laki. Sebagaimana dikemukakan Boserup (1984) muatan pelayanan dalam pekerjaan sebagai pedagang merupakan pencerminan dari sektor domestik. Dengan kata lain bisa pula dikemukakan, bahwa pedagang pada hakikatnya merupakan kepanjangan dari sektor domestik. Karena itu, tidak mengherankan jika kegiatan sebagai pedagang merupakan arena sosial bagi kaum wanita yang ingin bergerak ke sektor nafkah. Bertolak dari gagasan ini maka dapat dikatakan, bahwa tindakan *mendakocankan* anak wanitanya, tidak bisa dilepaskan dari usaha orang tua untuk mendomestikasikan anak wanita.

Domestikasi disertai dengan komodifikasi sehingga anak wanita berpeluang untuk mendapatkan imbalan finansial dan imbalan sosial. Imbalan finansial berwujud gaji PRT dan keuntungan dari kegiatan sebagai *dakocan*. Imbalan sosial berwujud pujian atas penampilan, kecantikan atau keelokan tubuhnya. Berkenaan dengan itu maka komodifikasi dalam konteks *dakocan*, tidak saja menyangkut pelayanan atas barang yang dijual, yakni minuman dan aneka kue, tetapi terkait pula dengan komodifikasi tubuh wanita. Sebagaimana dikemukakan Atmadja (2010) dan Bourdieu (2010) eksistensi wanita, termasuk di dalamnya peluang mereka memberikan masukan finansial bagi dirinya dan atau keluarganya, tidak bisa dilepaskan dari modal tubuh, tanpa mengabaikan modal lainnya, misalnya modal intelektual. Dengan meminjam gagasan Ibrahim (2007: 50) bisa pula dikatakan, bahwa kegiatan *dakocan* memunculkan tubuh "... sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menjual komoditi dan jasa sekaligus sebagai suatu objek yang dengan sendirinya dikonsumsi". Domestikasi, komodifikasi dan imbalan yang didapat, baik imbalan finansial maupun imbalan sosial, memberikan kepuasan bagi wanita. Sebab, apa yang dilakukan dan apa yang didapat, sesuai dengan kultural kewanitaan dan kultural dunia (*post-*) modern, sebagaimana dikemukakan

Lee (2006), yakni ditandai oleh anutan budaya konsumen yang sarat dengan pelampiasan hasrat lewat pasar dengan menggunakan uang. Kondisi ini mengakibatkan wanita tidak berkeberatan untuk meninggalkan SMP guna memasuki dunia *dakocan* dan PRT agar mereka mendapatkan uang guna memenuhi hasrat akan berbagai komoditas yang terkait dengan teknologi kecantikan dan atau yang lainnya.

Dualisme kultural: sektor informal dan formal

PRT dan *dakocan* bisa pula dilihat dari segi dualisme kultural lainnya, yakni sektor formal dan informal. Dengan mengacu kepada Effendi (1993) PRT dan *dakocan* termasuk sektor informal sehingga tidak memerlukan ijazah dan keterampilan tingkat tinggi untuk memasukinya. Kondisi ini berbeda daripada sektor formal, yakni pegawai negeri dan swasta yang membutuhkan persyaratan ijazah dan tambahan keterampilan untuk memasukinya. Asalkan bisa membaca, menulis dan berhitung (*calistung*) seseorang sudah bisa menjadi *dakocan* atau PRT – cocok bagi tamatan SD. Ijazah SMP apalagi SMA tidak diperlukan, bahkan bisa memunculkan hal yang sebaliknya, yakni wanita malu menjadi PRT dan *dakocan*. Ada kecenderungan semakin tinggi ijazah seseorang, semakin sulit baginya untuk mengambil pekerjaan tergolong rendah dan atau berkonotasi kasar. Berkenaan dengan itu maka kepemilikan ijazah yang rendah, justru mengakibatkan anak wanita tamatan SD tidak merasa malu menjadi PRT atau *dakocan*. Gejala ini tidak hanya karena keterbatasan modal intelektualnya – ijazah dan keterampilan, tetapi terkait pula dengan peluang untuk memilih pekerjaan bagi anak wanita tamatan SD memang amat terbatas

Dualisme kultural: memberi dan meminta

Dualisme kultural lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemilahan antara memberi dan meminta. Pada masyarakat Bali berlaku dalil, bahwa hubungan antara anak dan orang

tuanya, terikat pada jalinan meminta dan memberi. Anak meminta kepada orang tuanya, yakni berbagai barang dan atau jasa dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia dewasa. Sebaliknya, orang tua memberikan apa yang diminta oleh anak, sesuai dengan fungsi keluarga (orang tua) antara lain pemeliharaan anak (Haviland, 1985). Ekonomi pasar amat kuat pengaruhnya pada masyarakat Bali. Anak memiliki kelemahan, yakni sulit mengendalikan hasrat dan memiliki tangisan sebagai senjata ampuh untuk menaklukkan orang tua dalam memenuhi hasratnya. Kondisi ini mengakibatkan, pemeliharaan anak dalam konteks memberi dan meminta acap kali membutuhkan dana yang cukup besar.

Berkenaan dengan itu maka memberi sebagai kewajiban orang tua dan meminta sebagai hak anak, lebih-lebih bagi keluarga miskin, bisa dirasakan sebagai beban finansial yang berat. Karena itu, orang tua bisa melakukan pembalikan kultural dan struktur, yakni mengalihkan fungsi anak wanita, yakni dari peminta (penerima) menjadi pemberi masukan finansial kepada orang tuanya. Pembalikan ini mengharuskan anak wanita bekerja sebagai PRT dan *dakocan*. Dengan cara ini anak wanita bisa memberikan sumbangan masukan finansial bagi keluarganya, atau paling tidak untuk dirinya sendiri sehingga ketergantungan secara finansial kepada orang tua menjadi mengecil. Kesemuanya ini tidak saja merubah kedudukan anak wanita, yakni dari meminta menjadi memberi atau dari bergantung menjadi mandiri, tetapi berujung pula pada pengurangan beban ekonomi keluarga.

Sebaliknya, jika anak wanita tetap bersekolah, maka muncul makna merugikan atau menimbulkan beban keluarga, karena orang tua harus memberikan dana pendidikan dan dana tambahan lainnya yang jumlahnya bisa jadi cukup besar. Jadi, dualisme kultural meminta dan memberi tetap berlaku sehingga beban ekonomi keluarga menjadi berat. Dana yang diberikan kepada anak yang sedang bersekolah merupakan investasi yang memakan waktu lama untuk menariknya, bahkan bisa gagal mengingat,

banyak anak wanita berpendidikan tinggi ujung-ujungnya menganggur. Jika anak wanita bekerja, maka pengeluaran dana bisa dihentikan sehingga beban ekonomi keluarga menjadi mengecil. Orang tua pun bisa menarik investasi yang ditanamkannya melalui masukan finansial yang diberikan oleh anak wanitanya lewat penanganan pekerjaan sebagai PRT atau *dakocan*. Sebaliknya, jika anak wanita bekerja, dia tidak saja membalikkan dualisme kultural, yakni dari meminta menjadi memberi atau dari bergantung menjadi mandiri, tetapi bisa pula bermakna orang tua bisa menarik investasinya secara lebih cepat. Dengan demikian, ketidakberlanjutan sekolah anak wanitanya ke jenjang SMP, secara substansial bukan musibah, tetapi berkah bagi kehidupan keluarga.

Dualisme kultural: kota dan desa

Sebagaimana disinggung pada uraian di atas pekerjaan yang diidealkan oleh orang tua bagi anak wanitanya yang tidak melanjutkan ke SMP adalah menjadi PRT di kota Denpasar. Cita-cita ini juga bermuatan dualisme kultural, yakni kota dan desa lengkap dengan pentanda lainnya. Walaupun pemerintah telah berusaha mengkotakan desa lewat aneka program masuk desa, yakni TV, air, WC, listrik, telpon, dan lain-lain, namun citra desa sebagai komunitas tertinggal, tradisional, pinggiran, atau penuh dengan kesusahahan tetap ada. Sebaliknya, kota, lebih-lebih kota Denpasar sebagai kota metropolitan adalah penanda komunitas maju, modern, pusat atau penuh dengan kenikmatan indriawiah. Citra desa sebagai komunitas tertinggal atau pinggiran, dan kota sebagai komunitas yang penuh dengan kemajuan atau sebagai pusat peradaban, dikonstruksi secara sosial dan politis – pusat pemerintahan melalui sejarah yang panjang. Citra ini terpatri secara kokoh dalam pikiran sehingga menjadi ingatan kolektif yang sulit menghapuskannya. Akibatnya, kota memiliki daya tarik, sebaliknya desa mempunyai daya tolak, yakni mendorong warganya untuk meninggalkan desa guna merantau ke kota. Gagasan dikotomik ini

mempengaruhi pola berpikir orang tua, bahkan bisa pula anaknya, sehingga tidak mengherankan jika orang rela memutuskan tidak melanjutkan ke SMP agar bisa menjadi warga komunitas ideal yang dibayangkannya, yakni kota.

Kehidupan di kota memang penuh dengan kenikmatan antara lain diwarnai oleh tebaran budaya populer (pop) pada berbagai arenanya, yakni pusat-pusat perbelanjaan. Dengan meminjam gagasan Ibrahim (2007), Lull (1998) dan Strinati (2003) kota sebagai pusat budaya pop memberikan kenikmatan bagi PRT, baik lewat pengkonsumsian secara tidak langsung, yakni hanya sekedar menonton maupun pengkonsumsian secara langsung, yakni membeli dan memilikinya. Berkenaan dengan itu bukan rahasia lagi, bahwa gaya hidup berbudaya pop bagi PRT yang bekerja di kota Denpasar, seperti terlihat pada pakaian dan aksesoris yang dikenakannya, yakni celana jeans, HP, baju kaos, dan lain-lain menunjukkan gejala yang tidak kalah hebatnya. Masyarakat Bali memiliki ruang dan waktu yang amat kaya bagi wanita untuk mengkomunikasikan budaya pop, yakni saat-saat ritual agama, misalnya Hari Raya *Galungan* dan *Kuningan*, *Nyepi*, *piodalan* di pura, potong gigi (*metatah*), kawin, *ngaben*, dll. Pada saat ini wanita mengkomunikasikan identitas dirinya, yakni “Siapa saya?” lewat budaya pop yang dikenakan dan atau gaya hidup urbanit yang ditampilkannya.

Ketersediaan ruang dan waktu yang padat bagi pemameran budaya pop dan gaya hidup urbanit di tengah-tengah budaya desa yang dicitrakan tertinggal, tidak bisa diabaikan dalam kon-teks mendorong anak wanita untuk tidak melanjutkan ke SMP. Ada kenikmatan lebih yang didapati daripada mereka masuk ke SMP. Masuk SMP tidak saja berarti mengeluarkan uang – terus meminta dan bergantung, tetapi bermakna pula, bahwa mereka memasuki suatu ruang yang terikat pada tata aturan, yakni disiplin belajar dan keterbatasan dalam bergaya – wajib mengenakan pakaian seragam. Sebaliknya, menjadi PRT rela-tif lebih bebas dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kultural wanita, yakni penggelut sektor domestik. Hakikat manu-

sia sebagai makhluk peniru menimbulkan implikasi, pemameran budaya pop dan gaya hidup kekotaan yang bertubi-tubi pada saat mereka pulang kampung dari rantau, bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka mengajak temannya merantau untuk menjadi PRT sehingga terjadi kegiatan merantau secara berantai. Akibatnya, keengganan anak wanita memasuki SMP menjadi menular dan bertambah semarak dan sulit dibendung oleh siapa pun.

Dualisme kultural: menguasai (*me-*) dan dikuasai (*di-*)

Ungkapan orang tua bahwa anak wanitanya lebih baik disuruh menjadi PRT atau *dakocan* daripada melanjutkan ke SMP, tidak saja mencerminkan dualisme kultural yang terkait dengan ideologi patriarki, tetapi bisa pula dimaknai sebagai dualisme kultural dalam konteks menguasai (*me-*) dan dikuasai (*di-*). Dengan mengacu kepada Thwaites, Davis dan Mules (2009: 235) ideologi patriarki tidak saja menomorsatukan laki-laki, melainkan berlanjut pada "... tatanan sosial merupakan perkara otoritas laki-laki". Begitu pula Kadir (2007) menunjukkan, bahwa pemilahan laki-laki dan wanita tidak hanya mendasarkan diri pada perbedaan kelamin, melainkan secara kultural bermuatan kekuasaan. Kekuasaan tidak selamanya teraktualisasi dalam bentuk kekerasan, melainkan seperti dikemukakan Foucault dalam Harland (2006: 226) sebagai berikut.

Kekuasaan tidak dapat dipahami sebagai se bentuk kekuasaan represif yang negatif, melainkan ia muncul dalam bentuk lain. Kekuasaan harus dilihat sebagai se bentuk kekuasaan ekspansionis yang positif. "Kekuasaan cenderung pada (kekuatan yang bersifat menggerakkan, membuatnya tumbuh dan mengaturnya, ketimbang menghalang-halangnya, membuatnya tunduk, atau menghancurkannya. Kekuasaan semacam itu berlangsung bukan dengan larangan, melainkan dengan intervensi yang bersifat mengatur dan "prosedur-prosedur manajemen (Foucault dalam Harland, 2006: 226).

Dengan meminjam gagasan Gramsci sebagaimana dipaparkan Bocock (2007) bisa pula dikatakan, bahwa kekuasaan yang menimbulkan kepatuhan, tidak selamanya mendasarkan pada dominasi, melainkan bisa pula bersendikan pada hegemoni.

Berdasarkan gagasan itu maka tindakan anak wanita tidak melanjutkan ke SMP, selain sebagai representasi kondisi objektif – keluarga miskin, SMP jauh dari desa, meniru teman yang sukses merantau, tertarik budaya pop di kota, dan lain-lain, bisa pula karena permainan kekuasaan orang tua, khususnya ayah. Ayah memainkan kekuasaan secara halus melalui bujukan, rayuan atau cara-cara hegemonik berwujud tindakan manipulatif atas ajaran Agama Hindu atau kearifan sosial sehingga anak menjadi patuh. Misalnya, anak wanita dicekoki dengan gagasan ideal dalam Agama Hindu tentang *guru rupaka* yang menggariskan, bahwa anak harus *bhakti* (hormat) kepada orang tua (ayah, *guru*), diwujudkan dalam bentuk tindakan mengikuti perintah dan larangannya secara patuh (Parisada Hindu Dharma, 1972). Jika orang tua gagal melakukan permainan kekuasaan secara halus atau hegemoni tidak berhasil mewujudkan tujuan, maka kekuasaan bisa mengemuka dalam bentuk tindakan kekerasan sehingga muncul kekuasaan represif, koersif atau dominatif.

Dengan demikian, kesediaan anak wanita menjadi PRT atau *dakocan* tidak selamanya merupakan representasi dari situasi objektif, melainkan bisa pula melibatkan permainan kekuasaan orang tua (ayah), baik secara hegemonik maupun dominatif. Berkenaan dengan itu maka kemunculan kekerasan fisik dan psikologi meminjam gagasan Galtung (2003) dan Windhu (1992), begitu pula apa yang disebut kekerasan simbolik sebagaimana dikemukakan Bourdieu (2010) sangat besar peluangnya pada lingkungan keluarga. Akibatnya, anak wanita lulusan SD tidak memiliki kebebasan untuk menentukan eksistensi dirinya, kecuali harus menuruti apa yang diminta atau apa yang diindoktrinasikan oleh orang tuanya, yakni tidak melanjutkan ke SMP,

melainkan menjadi PRT atau *dakocan* di desanya.

Kondisi ini tidak hanya berlaku pada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya ke SMP, tetapi berlaku pula pada warga komunitas. Sebab, aneka gagasan itu merupakan pencerminan dari budaya dominan pada masyarakat Bali. Berkenaan dengan itu berarti pula motif orang tua mengkaryakan anak wanitanya guna mendapatkan masukan finansial, secara otomatis berlaku pada warga komunitas. Mereka pun bisa menerima realitas anak wanita menjadi PRT dan *dakocan*. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan, bahwa orang tua dan warga komunitas, bahkan bisa pula sang anak wanita, lebih tertarik pada uang yang dihasilkannya melalui PRT dan *dakocan*, daripada mengurus dana dan daya untuk melanjutkan ke SMP. Gagasan ini berkaitan dengan kapitalisme yang meresap pada masyarakat Bali (Atmadja, 2010). Kapitalisme memiliki ciri, bahwa "... uang menjadi ekuivalen umum dalam masyarakat kapitalis karena uang memainkan peranan tanpa batas dalam mengabstraksikan keinginan manusia dan memainkan peranan tanpa batas dalam kapitalisme" (Hartono, 2007: 97). Keperkasaan uang mengabstraksikan hasrat memunculkan masyarakat konsumsi (Baudrillard, 2004). Dengan mengacu kepada Atmadja (2010) kapitalisme yang berlanjut pada keperkasaan uang guna memenuhi hasrat sehingga memunculkan masyarakat konsumsi berlaku pada masyarakat Bali. Akibatnya, muncul sikap permisif pada warga komunitas dan orang tua, yakni menerima realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya, atau mereka tidak mencela melainkan memuja anak wanita yang mem-PRT-kan atau *mendakocankan* dirinya, karena mereka menghasilkan uang guna memenuhi hasratnya sendiri maupun keluarganya.

PENUTUP

Bertolak dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa apa yang terjadi di Buleleng, tidak selamanya karena faktor struktural, yakni

kemiskinan dan jarak sekolah yang jauh dari desa, melainkan bisa pula karena faktor kultural, yakni dualisme kultural, ideologi patriarki, kapitalisme, budaya konsumsi dan budaya tontonan. Walaupun faktor kultural bersifat nirnyata, namun menjadi nyata, karena terepresentasi pada ucapan dan tindakan orang tua, anak wanita, dan warga komunitas, yakni tidak mencela, tetapi memuja anak wanita yang menjadi PRT dan *dakocan* yang sekaligus berarti menyetujui pula tindakan mereka tidak melanjutkan ke SMP.

Berkenaan dengan itu maka usaha menggalakkan anak wanita tamatan SD untuk melanjutkan ke SMP dan jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi, tidak cukup hanya lewat program pendidikan gratis, melainkan memerlukan pula penanggulangan kendala struktural, berwujud pengentasan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak tertanggulangi, maka anak wanita akan dikorbankan dalam pemenuhan pendidikan formal, bahkan bisa pula dikaryakan – anak memiliki fungsi ekonomis guna menambah masukan finansial bagi keluarga. Masalah kemiskinan membutuhkan penanggulangan, sebab, jika tidak teratasi, maka yang menjadi korban tidak saja anak wanita, melainkan bisa pula anak laki-laki.

Penanggulangan kendala kultural membutuhkan kesadaran lewat pendidikan budaya yang ditujukan kepada orang tua, murid dan warga komunitas, dengan melibatkan berbagai lembaga atas dukungan berbagai aktor yang memiliki aneka keahlian. Pola ini sangat penting, mengingat, bahwa merubah tindakan lewat kesadaran budaya sangat sulit, karena budaya sebagai kognisi tidak selamanya bermuatan rasionalitas, melainkan berbaur dengan kepercayaan, rasa atau emosionalitas. Sasarannya, tidak hanya menyadarkan mereka tentang posisi pendidikan dalam konteks kebutuhan dasar, tetapi yang lebih penting adalah mengajak mereka untuk hidup menetralsir budaya konsumen, melalui strategi membiasakan diri berpegang pada asas kebutuhan, bukan azas keinginan (hasrat).

Bertolak dari gagasan ini berarti pula pendidikan budaya hendaknya berintikan pada usaha

mengajak warga masyarakat untuk lebih arif menyikapi godaan pasar sehingga peluang untuk menginvestasikan modal lewat pendidikan formal menjadi lebih besar. Apapun yang dilakukan, peran pemerintah tidak bisa diabaikan. Pemerintah yang baik tidak hanya menganjurkan orang tua agar menyekolahkan anaknya dengan janji-janji muluk, tetapi yang lebih penting harus pula disertai dengan kegiatan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat

miskin lewat penciptaan lapangan kerja sehingga peluang rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi lebih besar. Jika kebutuhan dasar yang paling dasar terpenuhi (makanan, pakaian dan perumahan) yang disertai dengan ketidakterjebakan pada budaya konsumerisme, maka ajakan untuk memikirkan kebutuhan dasar yang lebih tinggi, yakni pendidikan, pencapaiannya tentu lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, L. 2004. *Tentang Ideologi Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. (O.V. Arnof Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Arivia, G. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Asyhadie, N. 2004. *Hamparan-hamparan Gramatologi Derrida*. Yogyakarta: LKiS. Atmadja, N.B. 2010. *Komodifikasi Tubuh Perempuan Jaged "Ngebor" Bali*. Denpasar: Larasan.
- Atmadja, N.B. 2010a. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Barker, C. 2004. *Cultural Studies Teori dan Praktik*. (Nurhadi Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barthers, R. 2007. *Petualangan Semiologi*. (Stephanus Aswar Herwinarko Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baudrillard, J.P. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. (Wahyunto Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Boserup, E. 1984. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*. (Mien Joebhaar dan Sunarto Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Brooks, A. 2005. *Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. (S. Kunto Adiwibowo Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Bocock, R. 2007. *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. (Ikramullah Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, P. 2010. *Dominasi Maskulin*. (S. A. Herwinako Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Diatmika, I. B. Y. 2006. *Makna dan Fungsi Pelinggih ring Paumahan*. Denpasar: Panakom.
- Effendi, T. N. 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. (Asnawi dan Safrudin Penerjemah). Surabaya: Penerbit Eureka.
- Harland, Richard. 2006. *Superstrukturalisme Pengantar Komprehensif kepada Semiotika, Strukturalisme, dan Postrukturalisme*. (Iwan Hendarmawan Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Haviland, W.A. 1988. *Antropologi*. (R.G. Soekadijo Penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hartono, A. 2007. *Skizoanalisis Deleuze & Guattari: Sebuah Pengantar Genealogi Hasrat*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hoed, B.H. 2008. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ibrahim, Idi Subandy. 2007. *Budaya Populer sebagai Komunikasi Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Jackson, S. dan Jones, J. 2009 (ed). *Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer*. (Tim Penerjemah Jalasutra Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Kadir, H.A. 2007. *Tangan Kuasa dalam Kelamin Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*. Yogyakarta: Insist.
- Kurzweil, E. 2004. *Jaring Kuasa Strukturalisme dari Levi-Strauss sampai Foucault*. (Nurhadi Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lee, M. J. 2006. *Budaya Konsumen Terlahir Kembali Arah Baru Modernitas dalam Kajian Modal Konsumsi dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lull, J. 1998. *Media Komunikasi Kebudayaan Suatu Pendekatan Global*. (A. Setiawan Abadi Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Megawangi, R. 1999. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Mufidah. 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, R. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Panetje, G. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas.
- Parisada Hindu Dharma. 1972. *Upadesa Ajaran Agama Hindu*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma.
- Sanderson, S.K. 1993. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (Farid Wajidi dan S. Menno Penerjemah). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Strinati, D. 2003. *Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. (A. Mukhid Penerjemah). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Surayin, I. A. P. 2002. *Pitra Yajna*. Surabaya: Paramita.
- Thwaites, T., Davis, L. dan Mules, W. 2002. *Introducing Cultural and Media Studies Sebuah Pendekatan Semiotik*. (Saleh Rahmana Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Tong, R. P. 2004. *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. (Aqurini Priyatna Prabasmoro Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.
- Wiana, I. K. 1992. *Pelinggih di Pamerajan*. Denpasar: Upada Sastra.
- Windu, M. I. 1992. *Kekeuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.